



PERAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MEMPROMOSIKAN UMKM PONOROGO

Redi Lutvian Alfrianto¹, Yusuf Adam Hilman^{2*}, Ekapti Wahjuni DJ³, Irvan Nur Ridho⁴
Program Studi Ilmu pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email Korespondensi: 545471adamongis@gmail.com

Abstrak

UMKM terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, dan mensosialisasikan manfaat pembangunan. Jumlah UMKM di Indonesia meningkat sangat pesat dan kini mampu menampung hampir 97,2% dari total angkatan kerja. Tantangan yang dihadapi pengusaha UMKM bermacam-macam. Hambatan tersebut berupa keterampilan, kompetensi, keahlian, manajemen talenta, kewirausahaan, pemasaran, keuangan, dan lainnya. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya penjualan para pelaku UMKM tersebut. Dampak dari lambatnya perkembangan bisnis inilah yang membuat kebanyakan pelaku bisnis di Ponorogo gulung tikar atau menghentikan kegiatan usaha mereka. Dalam mempertahankan usahanya, para pelaku UMKM Ponorogo sangat membutuhkan uluran tangan dari Pemerintah. Dari kondisi tersebut maka permasalahan yang dapat diangkat adalah Peran Dinas kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dalam Mempromosikan UMKM Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dalam Mempromosikan UMKM Ponorogo dengan studi penelitian UMKM Sambal Mumase dan UMKM Getuk Sugeng dalam event Pekan Kreatif Ponorogo. Jenis Penelitian ini peneliti menggunakan metode *deskriptif dengan pendekatan kualitatif*. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa dengan adanya event Pekan Kreatif Ponorogo bisa membantu UMKM Ponorogo untuk mempromosikan produknya dan meningkatkan kualitas UMKM.

Kata Kunci : Peran Pemerintah; UMKM; Ekonomi Kreatif

THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF CULTURE, YOUTH TOURISM AND SPORTS IN PROMOTING PONOROGO MSMEs

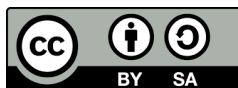
Abstract

UMKM have been proven to make a significant contribution in encouraging economic growth, creating jobs to reduce poverty, and socializing the benefits of development. The number of UMKM in Indonesia has increased very rapidly and is now able to accommodate almost 97.2% of the total workforce. The challenges faced by UMKM entrepreneurs are varied. These obstacles are in the form of skills, competencies, expertise, talent management, entrepreneurship, marketing, finance, and others. This has an impact on less than optimal sales for UMKM players. The impact

Redi Lutvian Alfrianto¹, Yusuf Adam Hilman^{2*}, Ekapti Wahjuni DJ³, Irvan Nur Ridho⁴ 6

Lisencee Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

Submitted: 30/04/2024; Accepted: 7/05/2024; Published: 30/06/2024



of slow business development is what makes most business people in Ponorogo go bankrupt or stop their business activities. In maintaining their business, Ponorogo's UMKM really need a helping hand from the Government. From these conditions, the problem that can be raised is the role of the Department of Culture, Tourism, Youth and Sports in promoting Ponorogo's UMKM. This research aims to determine the role of the Department of Culture, Tourism, Youth and Sports in promoting Ponorogo's UMKM with a research study of UMKM Sambal Mumase and UMKM Getuk Sugeng during the Pekan Kreatif Ponorogo event. This type of research uses descriptive methods with a qualitative approach. The technique for determining informants uses purposive sampling. From the research results, data was obtained that the Pekan Kreatif Ponorogo event could help Ponorogo's UMKM to promote their products and improve the quality of UMKM.

Keywords : Government Role; UMKM; Creative Economy

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah dan nasional. Menurut Tambunan (Tambunan 2012) UMKM di Indonesia terbukti berperan penting dalam menghadapi akibat dan dampak dari krisis ekonomi pada tahun 1997, ketika banyak perusahaan besar bangkrut, namun UMKM mampu bertahan ketika terjadi krisis.

Usaha menengah adalah suatu badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, atau besar yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau langsung atau tidak langsung menjadi bagiannya, oleh orang perseorangan atau kesatuan ekonomi, yaitu suatu usaha ekonomi yang dikelola secara mandiri dan produktif. Bagi usaha menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Menurut undang-undang ini, kriteria untuk mendefinisikan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah kekayaan bersih atau kekayaan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha itu berada, atau hasil penjualan tahunan.

UMKM terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, dan mensosialisasikan manfaat pembangunan. Jumlah UMKM di Indonesia meningkat sangat pesat dan kini mampu menampung hampir 97,2% dari total angkatan kerja. Namun pesatnya peningkatan jumlah UMKM tidak dibarengi dengan omzet yang tinggi (Sariwaty et al. 2019). Masalah yang sering dihadapi oleh pengusaha UMKM bersifat multidimensi, yang artinya UMKM memiliki banyak permasalahan (Maghfirah and BZ 2016) Seperti yang diungkapkan Kuncoro dalam Maria Nila Anggia and Muhammad Rifki Shihab 2019, Tantangan yang dihadapi pengusaha UMKM bermacam-macam. Oleh karena itu, selain banyak tantangan yang dihadapi UMKM, mereka juga menghadapi kendala. Hambatan tersebut berupa keterampilan, kompetensi, keahlian, manajemen talenta, kewirausahaan, pemasaran, keuangan, dan lainnya. Namun menurut Ketua Indonesia Marketing Association (IMA) Muhammad Awouddin, faktor pengetahuan khususnya pengetahuan bisnis dan pemasaran menjadi permasalahan utama, namun salah satu kelemahan bisnis rumahan adalah tidak banyak orang yang mengetahuinya (Triya Pramudya Wardani 2017).

Sedangkan para pelaku UMKM Ponorogo pada umumnya masih menggunakan cara-cara yang tradisional dalam mempromosikan produknya, hal ini berdampak pada kurang maksimalnya penjualan para pelaku UMKM tersebut. Sehingga perkembangan yang terjadi pada bisnisnya kurang signifikan dan cenderung lambat. Dampak dari lambatnya perkembangan bisnis inilah yang membuat kebanyakan pelaku bisnis Ponorogo gulung tikar atau menghentikan kegiatan usaha mereka. Dalam mempertahankan usahanya, para pelaku UMKM Ponorogo sangat membutuhkan uluran tangan dari Pemerintah. Mengingat adanya keterbatasan pengetahuan dalam promosi dan skill lain yang berhubungan dengan pengembangan usaha. Hal ini dibuktikan dengan ketika ada program yang di laksanakan Dinas Pariwisata untuk mempromosikan UMKM banyak dari

sebanyak 23 UMKM yang mendaftar, dua diantaranya adalah UMKM Sambal Mumase (Tambakbayan, Ponorogo) dan UMKM Gethuk Lindri Pak Sugeng (Mangkujayan, Ponorogo).

Pemerintah sangat mementingkan pengembangan UMKM agar mampu bertahan dan meningkatkan kesejahteraannya. Perhatian besar pemerintah terhadap UMKM merupakan langkah strategis tepat yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Keseriusan kepedulian pemerintah terhadap UMKM melalui program-program yang mengikutsertakan UMKM untuk tumbuh dan berkembangnya UMKM di Indonesia. Merespon fenomena tersebut, Disbudparpora Ponorogo melaksanakan event-event yang diselenggarakan secara berkala dengan melibatkan pelaku usaha UMKM, untuk mendongkrak promosi UMKM Ponorogo. Seperti konser musik, pameran seni, pagelaran reog, serta event keagamaan, semua event yang telah dilaksanakan oleh Disbudparpora Ponorogo diabadikan pada kanal media sosial Disbudparpora Ponorogo (IG @ponorogo.tourism), baik sesudah maupun sebelum event berlangsung. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Pemuda Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Ponorogo menggelar Pekan Kreatif Ponorogo pada 24-28 Oktober 2023. Kegiatan ini dilaksanakan selama lima hari di Alun-alun Ponorogo.

Bertepatan dengan hari kreatif indonesia tanggal 24 Oktober Pekan kreatif Ponorogo diselenggarakan. Dengan tema yang diusung “Komunitas Ekonomi Kreatif Ponorogo Bersinergi”. Acara ini memberikan kesempatan bagi para insan industri kreatif Ponorogo untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kegiatan Pekan Kreatif Ponorogo yang digelar selama lima hari di Alun-alun Ponorogo ini menarik perhatian dan mendapat respon positif. Stand pameran yang disediakan Kementerian Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga akan menampilkan sejumlah besar produk-produk dari pelaku UMKM dan pelaku industri kreatif, yang menjual produk-produk terbaik mulai dari kuliner, fesyen, hingga produk kreatif dan kreasi. Beragamnya produk menarik yang dihadirkan para pelaku ekonomi kreatif Ponorogo menimbulkan antusias yang besar dari para pengunjung warung dan menikmati makanan yang ditawarkan.

Dilatar belakangi oleh hal-hal tersebut maka peneliti menaruh minat untuk melaksanakan penelitian dengan judul “PERAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MEMPROMOSIKAN UMKM PONOROGO (Study Kasus UMKM Sambal Mumase dan UMKM Getuk Sugeng dalam event Pekan Kreatif Ponorogo)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dalam Mempromosikan UMKM Ponorogo dengan studi penelitian UMKM Sambal Mumase dan UMKM Getuk Sugeng dalam event Pekan Kreatif Ponorogo.

Tinjauan pustaka

Berdasarkan terminologinya, peran merupakan serangkaian tindakan yang diharapkan oleh orang-orang dalam bermasyarakat. Peran dalam bahasa Inggris disebut dengan “role” yang memiliki arti “tanggung jawab atau tugas pribadi pada sebuah perusahaan”. Artinya "tanggung jawab dan tugas insan terhadap tempat kerja maupun bisnis". Sementara itu, peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peran ialah sebuah kegiatan yang mewajibkan seseorang atau suatu organisasi agar melaksanakan sebuah kegiatan sesuai dengan cita-cita yang telah disetujui bersama, supaya bisa dijalankan dengan sebaik-bijaknya (Brigitte Lantaeda, Lengkong, and Ruru 2002). Menurut Ralph Linton dalam Budi Sulistyowati melalui buku Sosiologi Suatu Pengantar menjelaskan bahwa peran seseorang harus dipisahkan dari kedudukannya dalam interaksi sosial. Kedudukan seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan kedudukan individu dalam tatanan sosial. Sebaliknya, peran mengacu pada tindakan, adaptasi, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang mengambil posisi dalam masyarakat dan memenuhi suatu peran.

Menurut Max Weber, pemerintah adalah alat untuk memenuhi suatu peran. Hal ini diungkapkan oleh Max Weber dalam teori birokrasinya, dimana birokrasi merupakan instrumen kekuasaan bagi pemilik yang mengendalikannya, yakni ketika para birokrat mempunyai tujuan yang

sama dalam meneruskan birokrasi, katanya ada. Max Weber mengatakan, tipe birokrasi rasional dapat ditemukan dengan berbagai cara.:

- a. Pejabat musti bersikap rasional dengan di beri batasan oleh jabatan yang dimiliki.
- b. Jabatan disusun dari tingkat hierarki melalui penempatan top-down dan side, sehingga menimbulkan perbedaan hubungan kekuasaan.
- c. Secara khusus, setiap tugas dan fungsi masing-masing jabatan harus berbeda.
- d. Kontrak Jabatan adalah milik semua pejabat dan harus dilaksanakan..
- e. Semua pejabat berhak mendapat gaji dan dana pensiun.
- f. Jenjang karir terstruktur dan mempunyai perkembangan yang jelas.
- g. Untuk menjamin profesionalisme dan kinerja unggul, setiap pejabat harus diseleksi sesuai dengan kualifikasinya.
- h. Larangan keras kepada pejabat untuk menyalah gunakan jabatannya.
- i. Pejabat harus disiplin, mengikuti aturan sesuai sistem, dan diawasi setiap saat (Wakhid 2011)

Penerapan birokrasi dengan pola lama pada akhirnya akan mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan akibatnya, selain praktik-praktik seperti kolusi dan korupsi, terlihat jelas ketidakefisienan dan ketidakefisienan keberadaan birokrasi, sehingga akan berujung pada patologi birokrasi. Kronisme yang merajalela sehingga menimbulkan kebingungan dan permasalahan dalam kinerja pemerintahan. (Wakhid 2011).

Peran pemerintah dilihat dari berfungsinya lembaga-lembaga yang dilengkapi sarana, yaitu berfungsinya birokrasi yang diperlukan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional, sebagai wujud eksistensi negara yang menangani permasalahan-permasalahan lokal. komunitas, mampu. Jika demikian, diharapkan mampu menjalankan fungsi administrasi dan pelayanan dengan kompeten. Konsep-konsep birokrasi yang lama, yang terkenal dengan kompleksitas dan hierarkinya, perlu diminimalkan. (Usman 2011).

Pembenahan birokrasi yang ada di Indonesia dilakukan dengan melakukan reformasi yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan birokrasi yang diperlukan pada abad 21 adalah birokrasi yang dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan dalam rangka memenuhi amanah rakyat, hal ini merupakan sebuah realisasi. (Wakhid 2011). Kunci tata kelola pemerintahan yang baik terletak pada terciptanya birokrasi yang profesional dan baik (Samin 2011). Tata kelola yang baik merupakan perbaikan di berbagai bidang seperti paradigma, ideologi, budaya, bahkan manajemen pemerintahan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. (Duadji 2012).

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan serangkaian kebijakan untuk mempromosikan Kuliner Khas Ponorogo, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas untuk perlu disusunnya penelitian terkait Analisa Peran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga dalam mempromosikan UMKM Ponorogo.

Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan Moleong (2018) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mencerna suatu fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian contohnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, serta dengan sebuah konteks khusus yang alamiah serta dengan mempergunakan berbagai metode alamiah. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Ponorogo dengan data dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo yang beralamatkan di jl. Parmuka Kabupaten Ponorogo, dengan fokus pada Bidang Pemasaran Ekonomi Kreatif dengan maksud dan tujuan yang jelas untuk

menggali informasi mengenai peranan Dinas Pariwisata Ponorogo dalam membantu UMKM untuk mempromosikan produknya.

Metode wawancara ialah mengumpulkan data langsung dengan pemangku kepentingan dan memperoleh informasi yang diperlukan melalui tanya jawab secara langsung oleh pewawancara dan informan. Wawancara dilakukan dengan jujur dan secara langsung kepada informan dan partisipan penelitian. Sebelum terjun ke lapangan, panduan wawancara terlebih dahulu di siapkan oleh peneliti. Selain wawancara peneliti juga menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan data, yaitu dengan mengumpulkan data dari catatan dan dokumen yang tersedia di tempat penelitian maupun sumber lain yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Sebelum terjun ke lapangan, panduan dokumentasi terlebih dahulu di siapkan oleh peneliti.

Wawancara serta dokumentasi tersebut dilaksanakan kepada informan yang mana dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Ponorogo, pelaku UMKM dan pengunjung event dengan tujuan untuk mendapatkan informasi akurat dan mendalam mengenai Peran Dinas kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dalam Mempromosikan UMKM Ponorogo.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo mempromosikan UMKM Ponorogo

Peran Dinas Pariwisata Ponorogo dalam mempromosikan UMKM Ponorogo melalui Event pada periode 2022 sampai 2023. Dengan memberikan ruang kepada pelaku UMKM Ponorogo untuk mempromosikan produk mereka di dalam Event berupa stand atau booth yang disediakan oleh Dinas Pariwisata tanpa dipungut biaya, selain itu Dinas Pariwisata juga memberikan fasilitas berupa konsumsi setiap hari selama event berlangsung kepada UMKM Ponorogo yang berpartisipasi didalam event. Dalam mempromosikan UMKM Ponorogo Dinas Pariwisata juga menyelipkan sesi Khusus untuk produk UMKM Ponorogo seperti “1000 Gethuk Gratis” didalam rangkaian event Pekan Kreatif Ponorogo atau “1000 Cup Kopi Gratis” dalam rangkaian event Ponorogo Creative Festival. Dalam menjalankan perannya untuk mempromosikan UMKM Ponorogo, Dinas Pariwisata tidak membatasi kepada UMKM untuk ikut serta dalam event, UMKM apapun boleh ikut serta dalam event dengan mendaftar sesuai prosedur yang sudah Dinas Pariwisata Ponorogo unggah pada sosial media milik Dinas Pariwisata Ponorogo (@ponorogotourism). Namun Dinas Pariwisata Ponorogo memiliki kendala berupa jumlah stand yang bisa Dinas Pariwisata sediakan, ini dipengaruhi oleh besarnya tempat acara yang diselenggarakan, untuk mensiasati hal tersebut Dinas Pariwisata memberlakukan sistem rolling atau bergantian sesuai dengan rangkaian acara selama periode 2022 sampai 2023.

Peranan yang di laksanakan oleh Dinas Pariwisata Ponorogo dalam mempromosikan UMKM Ponorogo melalui Rangkaian Event selama 2022 hingga 2023 telah berhasil, hal ini di konfirmasi oleh pelaku UMKM yang merasa terpuaskan dengan hasil dari berpartisipasi dalam event yang dilaksanakan Dinas Pariwisata. Kedua pelaku UMKM sepakat bahwa dengan ikut serta dalam rangkaian event yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dapat meningkatkan penjualan pada produk Mereka, baik ketika sedang pameran maupun diluar pameran sangat berdampak pada penjualan. Kedua pelaku UMKM juga menambahkan bahwa banyak konsumen yang mengetahui keberadaan produk mereka dari event yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Sesuai dengan yang di sampaikan oleh Dinas Pariwisata Ponorogo bahwa pelaku UMKM tidak dipungut biaya dalam keikutsertaanya ketika pameran pada event, kedua pelaku mengkonfirmasi bahwa tidak ada pungutan biaya bahkan mendapatkan fasilitas konsumsi selama pameran berlangsung

2. Program-program penguatan UMKM Ponorogo oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo mempromosikan UMKM Ponorogo

Dalam mempromosikan UMKM Ponorogo Dinas Pariwisata Ponorogo belum memiliki event yang dikhususkan untuk UMKM saja, sesuai dengan Undang-Undang Ekonomi Kreatif No. 24 Tahun 2019 sebagai produk kebijakan dari Kemenparekraf bahwa terdapat 17 sub-sektor ekonomi kreatif yang harus di akomodir oleh dinas Pariwisata dalam merumuskan sebuah Event, yang mana didalamnya juga termasuk kebudayaan, kriya maupun kuliner. Hal tersebut justru dimanfaatkan untuk membantu minat pengunjung

untuk hadir dalam event, sehingga dapat dipastikan bahwa disetiap event yang Dinas Pariwisata Ponorogo laksanakan mengikutsertakan para pelaku UMKM Ponorogo untuk berpartisipasi didalamnya.

Dinas Pariwisata telah memberi fasilitas kepada para pelaku UMKM Ponorogo untuk turut mempromosikan produk yang mereka miliki dengan ikut serta dalam pameran di sebuah event yang Dinas Pariwisata laksanakan serta membungkus event-event tersebut dengan acara kesenian, kebudayaan maupun konser. Efek yang ditimbulkan dengan adanya event tersebut menurut Dinas Pariwisata sendiri yang pertama berfokus pada kuantitas masyarakat yang berminat menghadiri event yang diselenggarakan. Dengan kuantitas kehadiran masyarakat yang baik maka akan mempermudah para pelaku UMKM untuk mempromosikan produk mereka.

Pelaku UMKM menyampaikan bahwa tidak ada ajakan dalam merumuskan sebuah event, mereka justru yang mendaftarkan diri kepada Dinas Pariwisata untuk dapat berpartisipasi membuka lapak didalam event sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Ponorogo, selain melalui jalur pendaftaran salah satu UMKM juga menyebutkan bahwa mereka mendapatkan undangan dari Dinas Pariwisata untuk ikut serta dalam event.



Gambar 1. Pamflet Rangkaian Acara Ekonomi Kreatif
(Sumber : Akun Instagram ponorogo tourism)

3. Efektifitas program penguatan UMKM Ponorogo melalui event

Pelaku UMKM merasa sangat terbantu dengan dilaksanakannya serangkaian event oleh Dinas Pariwisata dan antusias untuk ikutserta apabila dikemudian hari dilaksanakan event kembali oleh Dinas Pariwisata.



Gambar 2. UMKM Getuk Sugeng di Event
(Sumber :Dokumentasi lapangan peneliti)

Dengan dilaksanakannya serangkaian event bisa menambah pilihan untuk masyarakat dalam mencari hiburan di Kabupaten Ponorogo, event Dinas Pariwisata bisa menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu dengan orang tercinta. Konsumen berpendapat dengan adanya rangkaian event yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dapat memberikan informasi mengenai UMKM yang ada di Ponorogo dengan mudah sekaligus untuk mencari hiburan, konsumen dapat mengetahui berbagai macam produk UMKM serta mencoba produknya secara cuma-cuma yang sebelumnya tidak diketahui oleh konsumen, namun ada beberapa konsumen yang memang fokusnya untuk menikmati pertunjukan bukan untuk berbelanja. Adapun beberapa saran yang diutarakan oleh konsumen seperti memperbanyak tempat eventnya supaya keramaiannya merata diseluruh Kabupaten Ponorogo, kemudian untuk memfokuskan event untuk UMKM, dan meningkatkan periklanan yang digunakan oleh Dinas Pariwisata dalam mempromosikan event berupa sosial media yang lebih tingkatan.

Pendapat dari peserta event dan pengunjung event dengan adanya rangkaian event yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo adalah merasa terbantu dengan berbagai catatan. Peserta event mengungkapkan bahwa dengan ikut serta dalam event memberikan dampak positif bagi penjualan UMKM mereka, sedangkan bagi para pengunjung dengan adanya event memberi mereka alternatif untuk mendapatkan hiburan di Kabupaten Ponorogo dan mempermudah mereka untuk mendapatkan informasi mengenai ragam UMKM masyarakat Ponorogo.

Kesimpulan

Dengan adanya UU Ekonomi Kreatif No.24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif bertujuan untuk mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Pengelolaan Ekonomi Kreatif dan potensinya perlu dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Sehingga pengambilan kebijakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Ponorogo menjadi luas dan harus mengakomodir 17 sub-sektor. UU Ekonomi Kreatif No.24 Tahun 2019 menyatakan bahwa terdapat 17 sub-sektor ekonomi kreatif yang wajib di kembangkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, misalnya adalah seni pertunjukan, kriya dan sektor kuliner. Eksekusinya di lapangan berupa rangkaian event selama satu tahun dengan berbagai tema yang mana dalam event tersebut melibatkan semua 17 sub sektor ekonomi kreatif.

Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo dalam mempromosikan UMKM masyarakat Ponorogo sejauh ini adalah melalui event yang bisa dipastikan melibatkan UMKM masyarakat Ponorogo. Ini mengacu pada arahan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui UU Ekonomi Kreatif No.24 Tahun 2019, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo melaksanakan serangkaian event yang mengakomodir 17 sub sektor Ekonomi Kreatif serta memberikan ruang untuk UMKM untuk pameran dalam rangkaian event. Contohnya Ponorogo Rikolo Semono, Ponorogo Creative Festival & Pekan Kreatif Ponorogo, semua event yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo memiliki pola yang sama, yaitu diadakan pertunjukan seni sebagai event besarnya kemudian diikuti dengan pameran UMKM selama event berlangsung.

Pendapat dari peserta event dan pengunjung event dengan adanya rangkaian event yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo adalah merasa terbantu dengan berbagai catatan. Peserta event mengungkapkan bahwa dengan ikut serta dalam event memberikan dampak positif bagi penjualan UMKM mereka, sedangkan bagi para pengunjung dengan adanya event memberi mereka alternatif untuk mendapatkan hiburan di Kabupaten Ponorogo dan mempermudah mereka untuk mendapatkan informasi mengenai ragam UMKM masyarakat Ponorogo.

Referensi

- Brigette Lantaeda, Syaron, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru. 2002. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 04(048): 243.
- Duadji, Noverman. 2012. "Good Governance Dalam Pemerintah Daerah." *MIMBAR* 28: 201–9.
- Lexy J Moleong. 2018. *Metodology Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maghfirah, Mifta, and Fazli Syam BZ. 2016. "Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Penerapan Metode Full Costing Pada Umkm Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 1(2): 1.
- Maria Nila Anggia, and Muhammad Rifki Shihab. 2019. "Strategi Media Sosial Untuk Pengembangan Umkm." *Jurnal Terapan Teknologi Informasi* 2(2): 159–70.
- Samir, Rumzi. 2011. "REFORMASI BIROKRASI." *Jurnal Fisio Umrab*: 172–82.
- Sariwaty, Yulia, Dini Rahmawati, Femi Oktaviani, and Ali Amran. 2019. "Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Calief Melalui Implementasi Komunikasi Pemasaran." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(Februari): 218–24. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/abdimas>.
- Tambunan, Tulus. 2012. "Peran Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Daerah." *Jurnal Bina Praja* 04(02): 73–92.
- Triya Pramudya Wardani, Ekapti Wahjuni Dj. 2017. "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Eksistensi Industri Sate Ayam Dalam Persaingan Kuliner Fast Food (Studi Kasus: Sentral Industri Sate Ayam Kelurahan Nologaten Kabupaten Ponorogo)." *Indonesian Journal Of Governance and communications studies* 1(1): 92–102.
- Usman, Jaelan. 2011. "Manajemen Birokrasi Profesional Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1(2).
- Wakhid, Ali Abdul. 2011. "Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia." *Jurnal TAPIS* 7(2): 125–46. <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/100>.